



## 70 Saksi Diperiksa Kejaksanaan

■ Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata di Sleman

**SLEMAN, TRIBUN** - Per-kara dugaan korupsi dana hibah pariwisata yang disalurkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) ke Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2020, terus berjalan di meja penyidik Kejaksanaan Negeri Sleman.

Sejauh ini, Jaksa penyidik telah memeriksa puluhan orang dalam pengusutan perkara tersebut. "Sekitar 70an saksi (yang telah diperiksa)," ucap Kasi Pidana Khusus Kejari Sleman, Ko Triskie Narendra, Sabtu (10/6).

Puluhan saksi yang diperiksa tersebut masih sama. Mereka dari kelompok masyarakat wisata penerima hibah dan dinas terkait, yang melakukan administrasi dalam proses penyalurannya.

Sekadar diketahui, total pagu anggaran dana hibah pariwisata Kemenparekraf yang diberikan ke Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2020 senilai Rp68,5 miliar. Menurut jumlah tersebut, yang ditransfer dari kas negara ke kas daerah senilai Rp49.711.272.645.

Anggaran tersebut ditransfer dua tahap dan disalurkan kepada pelaku wisata di Bumi Sembada supaya bisa bangkit dari pandemi Covid-19. Jumlah penerima dana hibah, baik dari kelompok desa wisata maupun obyek wisata, sebanyak 244 kelompok de-

ngan nilai anggaran yang disalurkan Rp17,1 miliar.

Anggaran hibah juga diberikan untuk membantu Industri Pariwisata berupa 92 hotel dan 45 restoran senilai Rp27,5 miliar. Lalu, untuk sosialisasi dan implementasi program CHSE, dukungan revitalisasi sarana dan prasarana kebersihan, keindahan dan keamanan serta pengawasan penerapan prokes bagi 40 usaha jasa pariwisata senilai Rp177,9 juta.

Selanjutnya, 1,5 persen dari total dana hibah digunakan sebagai biaya operasional dan *review* aparat pengawas internal pemerintah (APIP) senilai Rp921,3 juta. Dalam pelaksanaan penyaluran dana hibah tersebut, Kejaksanaan Sleman menduga terjadi peristiwa pidana sehingga melakukan proses penyelidikan.

Jaksa kemudian menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan pada April lalu. Sampai saat ini, proses pengusutan terus berjalan dengan jumlah saksi yang telah diperiksa mencapai 70 orang.

"Belum ada (yang ditetapkan) tersangka," kata Triskie.

Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan Jogja

Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba sebelumnya terus menagih kinerja Kejaksanaan Negeri Sleman untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi dana hibah pariwisata tersebut.

Pihaknya mendorong Kejaksanaan segera menetapkan nama tersangka. "Jika sudah

naik ke tahap penyidikan segera saja ditetapkan tersangkanya. Jangan kelamaan, karena masih menunggu penghitungan kerugian negara oleh BPK atau BPKP DIY, dan tak perlu menunggu rampungnya semua saksi-saksi diperiksa lalu ditetapkan tersangka. Tetapi, perlu bertahap saja dalam pemeriksaan saksi," kata Kamba.

Ia meyakini, dengan dinaikkannya kasus dugaan korupsi tersebut ke tahap penyidikan, artinya Kejari Sleman telah memiliki minimal dua alat bukti yang cukup. Karena itu, tak perlu berlama-lama lagi dalam menetapkan tersangka.

"Harapannya, siapa pun yang terlibat dalam kasus ini harus diproses hukum secara adil, profesional dan transparan. JCW akan mengawal kasus ini hingga vonis pengadilan Tipikor Yogyakarta," ujar dia. (rif)

**Sekitar 70an Saksi (yang telah diperiksa).**